



Available online at: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JLC>

**LEARNING COMMUNITY**

**Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 3 (2), 2019, 50-58**

## **Peran Tokoh Masyarakat Dalam Peningkatan Partisipasi Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan Di PKBM Nurul Huda Kabupaten Jember**

Ulva Verani, Niswatul Imsiyah, Muhammad Irfan Hilmi

Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Jl. Kalimantan No. 37, TegalBoto, Jember 62811, Indonesia

Email: [uverani9@gmail.com](mailto:uverani9@gmail.com), [niswatul@unej.ac.id](mailto:niswatul@unej.ac.id)

### **Abstrak**

Rendahnya partisipasi warga belajar merupakan permasalahan yang perlu diselesaikan. Dalam lembaga pendidikan, tokoh masyarakat memiliki peran yang membantu warga belajar. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran tokoh masyarakat dalam peningkatan partisipasi warga belajar pendidikan kesetaraan program paket B di PKBM Nurul Huda Kabupaten Jember. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi sumber dan teknik. Analisis datanya interaktif model Mile and Huberman terdiri reduksi, display, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tokoh masyarakat yakni peran fasilitatif, pendidikan dan representasi telah dilakukan saat pelaksanaan program pendidikan kesetaraan paket B berlangsung namun hasil partisipasi yang diperoleh lebih banyak berasal dari inisiatif warga belajar sendiri. Partisipasi yang diberikan berupa ide/buah pikiran, tenaga dan materi/harta benda.

**Kata Kunci:** *Peran Tokoh Masyarakat, Partisipasi, Pendidikan Kesetaraan.*

## ***Role Of Community Figure In Improving Participation Of Equality Education Program In Nurul Huda Community Learning Center Jember***

### **Abstract**

*The low participation of learning citizens is a problem that needs to be resolved. In educational institutions, community leaders have roles that help learning citizens. This study aims to describe the role of community leaders in increasing the participation of citizens learning the Package-B (Equivalent to Junior Secondary School). equality education program in Community Learning Center Nurul Huda, Jember. This type of research is qualitative descriptive. Determination of informants in this study using purposive area and sampling. The technique of collecting data uses interviews, observation and documentation. The validity technique uses an extension of observation, increases perseverance, source triangulation and technique. The interactive data analysis of the Mile and Huberman model consists of reduction, display, and verification. The results showed that the role of community leaders, namely the role of facilitative, education and representation, was carried out when the implementation of the Package-B (Equivalent to Junior Secondary School) equality education program took place, but the results of the participation obtained were mostly from the initiative of the self-learning citizens. Participation is given in the form of ideas / thoughts, energy and material / property.*

**Keywords:** *Role of Community Figure, Participation, Equality Education Program*

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu indikator ukuran dimana negara dapat dikatakan maju atau masih berkembang. Hal ini karena pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Meningkatnya sumber daya manusia akan mempengaruhi pembangunan sebuah negara yang lebih baik. Usaha untuk memperoleh mutu pendidikan yang lebih baik telah dilakukan baik oleh pemerintah, pelaksana/penyelenggara dan juga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Masyarakat dan Pemerintah Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu".

Namun realitanya berbeda dengan pendidikan yang ada di Kabupaten Jember tidak semua masyarakat memperoleh hak yang sama untuk menempuh pendidikan. Hal tersebut terbukti dari data rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Jember menurut BPS tahun 2016 adalah 6,82 atau setara dengan kelas 1 SMP. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat penduduk Kabupaten Jember tingkat pendidikannya belum setara lulus SMP.

Upaya meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat Kabupaten Jember yang belum memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di jalur formal dan untuk meningkatkan kualitas rata-rata lama/tingkat pendidikan masyarakat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah mempunyai solusi tersendiri yaitu melalui pemberian dana baik APBD maupun APBN yang dianggarkan khusus untuk membantu masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung dan memiliki keterbatasan melalui jalur pendidikan non formal. Keterbatasan masyarakat itu disebabkan karena masalah ekonomi, usia dan waktu yang dimiliki oleh masyarakat apabila menempuh pendidikan di jalur formal.

Pendidikan kesetaraan merupakan salah satu layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti bagi masyarakat yang memerlukan pendidikan. Penyelenggara program pendidikan kesetaraan telah dilaksanakan oleh masyarakat maupun

pemerintah. Program pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat salah satunya dilakukan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM merupakan lembaga/institusi tempat belajar masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan non formal. Pendidikan yang diselenggarakan oleh PKBM diantaranya adalah pendidikan kesetaraan. Pada pelaksanaan program pendidikan kesetaraan tingkat keberhasilannya masih terlihat belum maksimal dan memuaskan. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan adanya data rata-rata lama pendidikan lulusan setara dengan kelas 1 SMP yang masih saja mendominasi, meskipun rata-rata lama pendidikan mengalami peningkatan, namun hasilnya masih tidak sesuai yang diharapkan. Pendidikan kesetaraan paket B merupakan solusi bagi masyarakat yang putus sekolah menengah pertama dan belum menyelesaikan sampai lulus. PKBM yang ada di Kabupaten Jember salah satunya PKBM Nurul Huda. PKBM ini merupakan penyelenggara pendidikan kesetaraan paket B.

Pendidikan kesetaraan paket B di PKBM ini sudah dilaksanakan sejak tahun 1998 sampai sekarang. Meskipun sudah berjalan lama, PKBM ini masih saja saat melaksanakan program pendidikan kesetaraan tidak terlepas dari masalah atau hambatan. Masalah tersebut diantaranya terjadi pada komponen program. Ada beberapa komponen program dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah terdiri dari masukan, proses dan hasil program (Mappa dalam Sudjana, 2008: 87). Komponen masukan atau input salah satunya adalah warga belajar. (Arief dalam Sudjana, 2008: 87) mengatakan bahwa "Warga belajar adalah peserta didik yang diorganisasi berdasarkan kebutuhan belajar, minat dan potensi-potensi pembelajaran yang tersedia".

Warga belajar menjadi masalah yang paling krusial di lapangan. Dimana permasalahan itu kerap terjadi adalah partisipasi warga belajar dalam mengikuti pendidikan kesetaraan. Permasalahan yang sama juga terjadi pada pendidikan kesetaraan PKBM Nurul Huda. Rendahnya partisipasi warga belajar menjadi masalah yang perlu diselesaikan agar pelaksanaan dan

hasil dari program pendidikan kesetaraan berjalan sesuai dengan harapan.

Setiap penyelenggara pengelola pendidikan kesetaraan sudah memiliki strategis sendiri untuk mencari solusi permasalahan. Seperti halnya dengan PKBM Nurul Huda yang menggunakan strategis salah satunya dengan pemanfaatan peranan masyarakat yakni tokoh masyarakat yang ada disekitar. Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Pasal 54, Ayat (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.(2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Namun fakta di lapangan, tidak semua pengelola atau penyelenggara melibatkan pemanfaatan peranan tokoh masyarakat, padahal apabila hal itu diterapkan tentu akan membawa dampak positif yakni dapat membantu program kerja terhadap pelaksanaan pendidikan kesetaraan khususnya pada peningkatan partisipasi warga belajar.

Keterlibatan peran tokoh masyarakat dianggap penting karena tokoh masyarakat merupakan salah satu orang yang terdekat dengan masyarakat dan dianggap paling banyak mengetahui tentang kondisi, keadaan, karakteristik masyarakat setempat sehingga dengan keterlibatannya dapat mempermudah penyelenggara atau pengelola dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu tokoh masyarakat juga dianggap orang yang memiliki tingkat sumber daya manusia yang lebih, baik itu karena pengalamannya, pendidikan maupun pengetahuannya sehingga dapat mengerti yang sedang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sendiri.

Selama ini solusi yang digunakan dalam peningkatan partisipasi warga belajar kebanyakan selalu melibatkan faktor intern saja, padahal faktor ekstern seperti ini juga dapat membantu penyelenggara dalam menyelesaikan tugas meningkatkan mutu pendidikan secara lebih maksimal lagi. Realita yang terjadi dilapangan tidak semua tokoh masyarakat terlibat dalam memaksimalkan perannya untuk masyarakat termasuk pada

pendidikan kesetaraan yang selama ini sedang berlangsung. Tokoh masyarakat hanya dijadikan sebagai formalitas sekedar perihal perijinan saja, tanpa diikut sertakan perannya dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta sumber pendidikan kesetaraan. Padahal sejatinya peranan tokoh masyarakat dibutuhkan karena pendidikan kesetaraan merupakan salah satu proses dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat yaitu melalui peningkatan partisipasi yang nantinya akan memperbaiki pembangunan non fisik dibidang pendidikan.

### **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan, dimulai dari bulan Oktober 2018 sampai Maret 2019. Dengan perincian waktu penelitian 2 bulan persiapan yakni terdiri dari studi pendahuluan dan penyusunan proposal 2 bulan penelitian dan 2 bulan penyelesaian laporan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan tempat yang digunakan pada penelitian ini, peneliti menggunakan *purposive area* artinya dimana tempat penelitian yang sudah ditentukan dengan sengaja lokasi tersebut relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2014: 23). Teknik penentuan informan yang digunakan pada penelitian ini peneliti menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* dipilih peneliti berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2014: 24). Dimana tujuan pada penelitian ini memperoleh data yang nantinya bisa menggambarkan/mendeskripsikan peran tokoh masyarakat dalam peningkatan partisipasi warga belajar pendidikan kesetaraan paket B di PKBM Nurul Huda Kabupaten Jember. Teknik keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi sumber dan teknik.

Pada penelitian ini data yang diperoleh dibedakan menjadi dua bagian yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung, yang mana pada penelitian ini data diperoleh dari teknik observasi dan wawancara melalui informan kunci dan

pendukung. Informan kunci pada penelitian ini adalah tokoh masyarakat yang terlibat pada hal ini salah satunya adalah tokoh agama dan warga belajar pendidikan kesetaraan paket B, sedangkan informan pendukung terdiri atas tutor dan pengelola PKBM Nurul Huda. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti melalui dokumentasi baik dari informan yang ada di lembaga maupun dari referensi-referensi yang digunakan pada penelitian ini. Pada penelitian ini teknik analisis data selama dilapangan menggunakan Miles dan Huberman yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi, display dan verifikasi data (Mile and Huberman dalam Sugiyono, 2014: 21).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan dengan data yang diperoleh saat penggalian dan pengumpulan data dilapangan, dapat dirumuskan temuan/hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian guna menjawab bagaimana peran tokoh masyarakat dalam peningkatan partisipasi warga belajar pendidikan kesetaraan paket B di PKBM Nurul Huda Kabupaten Jember sesuai data yang didapatkan ketika penelitian di lapangan bahwa tokoh masyarakat memiliki dan menjalankan perannya dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan paket B. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat memiliki dan menjalankan perannya dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan paket B.

Peran yang dijalankan tokoh masyarakat sesuai dengan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah peran 1). fasilitatif, 2). pendidikan dan 3). representasi. Indikator peran tokoh masyarakat dalam fasilitatif dilakukan tokoh masyarakat dengan stimulasi, dukungan baik dukungan informal maupun formal dan animasi sosial yakni kemampuannya untuk membangkitkan energi, inspirasi, antusiasisme termasuk mengaktifkan, menstimulasi dan memberikan motivasi. Hasil peran fasilitatif tokoh masyarakat sudah melakukan peran animasi sosial dalam hal memberi motivasi selain itu masih belum. Sedangkan dukungan diberikan tokoh masyarakat dengan memfasilitasi pinjaman baik berupa tempat, waktu dan menghadiri undangan ketika ada pertemuan.

Indikator Peran pendidikan dilakukan tokoh masyarakat dengan meningkatkan kesadaran, pemberian informasi dan pelatihan yang diwujudkan tokoh masyarakat dengan meningkatkan kesadaran melalui ketika sedang proses life skill keagamaan yang diisi oleh Ustad, sedangkan pemberian informasi dilakukan tokoh masyarakat ketika dengan pengelola dan tutor, untuk dengan warga belajar masih belum dan untuk yang pelatihan dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan baik sebagai maupun sebagai instruktur.

Peran fasilitatif merupakan peranan yang diarahkan untuk menstimulasi dan memberikan dukungan dalam praktiknya, dimana didalamnya termasuk kemampuan untuk membangkitkan energi, inspirasi, stimulasi dan motivasi kepada warga belajar untuk melakukan suatu kegiatan (Huraerah, 2011: 165). Harapan dari hasil kemampuan yang dimiliki tokoh masyarakat ini dapat membangun warga belajar untuk lebih baik lagi yang nantinya ketika warga belajar sudah terbangun, maka partisipasi warga belajar juga mengikuti pada peningkatan partisipasinya. Sesuai dengan hasil temuan pada saat penelitian, tokoh masyarakat belum secara maksimal dalam memberikan peran fasilitatif terhadap warga belajar sehingga untuk membangun warga belajar yang lebih baik atau tetap, hanya bisa ditentukan oleh warga belajar sendiri, padahal semakin baik peran fasilitatif yang diberikan oleh tokoh masyarakat maka akan semakin baik pula partisipasi warga belajar.

Ketika tokoh masyarakat mampu menjalankan perannya dalam membangun warga belajar melalui kemampuannya dalam membangkitkan energi dan seterusnya, warga belajar akan turut serta dalam berpartisipasi paling tidak warga belajar ikut berpartisipasi dalam bentuk tenaga yakni dengan mengikuti semua kegiatan yang telah dilaksanakan program pendidikan kesetaraan dengan rajin. Selanjutnya dalam peran fasilitatif adalah memberikan dukungan untuk warga belajar, dimana dukungan ini untuk memperkuat, mengakui, menghargai nilai dan kontribusi orang lain. Dukungan pada hal ini dibagi menjadi dua yakni dukungan yang bersifat formal dan informal (Ife dalam Huraerah, 2011: 173). Pada hasil temuan yang diperoleh dari penelitian ini

dukungan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat setempat masih pada dukungan yang bersifat informal, yang mana hal ini diwujudkan dengan memberikan bantuan baik tempat, penyediaan waktu yang cukup, kemudahan untuk terlibat dalam kegiatan yang telah ada.

Adanya turun tangan langsung tokoh masyarakat dengan warga belajar membuat warga belajar menjadi kekuatan sendiri bagi warga belajar untuk berpartisipasi karena pengaruh tokoh masyarakat menjadi daya tarik/kekuatan untuk membangkitkan energi warga belajar. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam mengikuti kegiatan dalam kelompok atau perkumpulan dapat melakukan peran sebagai fasilitasi kelompok dimana dalam hal ini salah satunya ketika tokoh masyarakat ikut menghadiri kumpulan atau rapat yang dilaksanakan oleh pengelola dan ketika tokoh masyarakat mendapat undangan mau datang. Dari kumpulan/rapat itulah tokoh masyarakat mampu memberikan usulan-usulan dimana usulan itu dapat membantu pelaksanaan pendidikan kesetaraan paket B yang harapannya dapat meningkatkan partisipasi warga belajar dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan pendidikan kesetaraan yang ada.

Peran Pendidikan, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada indikator tokoh masyarakat ketika melakukan peran pendidikan. Seperti memberikan peningkatan kesadaran kepada warga belajar, memberikan informasi dan juga ikut andil dalam menyelesaikan masalah, namun yang dilakukan oleh tokoh masyarakat terkait hal tersebut masih sedikit sumbangsinya, hal ini dipengaruhi keterbatasan tokoh masyarakat yang hanya bisa masuk ketika saat mengisi saja, diluar itu masih hanya sebatas dengan warga belajar yang tinggal disekitar saja. Menurut Zubaedi (2014: 34) menyatakan bahwa upaya menumbuhkan partisipasi warga belajar diawali dengan cara menggugah kesadaran warga belajar akan hak-haknya untuk hidup secara lebih bermutu, realitas permasalahan yang dihadapi serta perlunya tindakan dalam mengupayakan perbaikan kehidupan. Sesuai dengan pendapat diatas bahwa tokoh masyarakat telah melakukan tindakan upaya dalam kehidupan dalam segi religi karena memang tokoh masyarakat yang terlibat

dalam peran ini merupakan Ustad sehingga sesuai dengan bidang yang dimiliki tokoh masyarakat itu sendiri.

Indikator peran pendidikan selanjutnya adalah peran pemberian informasi dimana menurut Ite dalam Huraerah (2011: 73) peran pendidikan yang diberikan selanjutnya adalah pemberian informasi, dimana informasi yang diberikan yang relevan dengan masyarakat dimana pada hal ini informasi yang diberikan baik bersifat internal maupun eksternal. Informasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam bidang internal dilakukan dengan baik masyarakat maupun pengelola dimana pada hal ini yang diberikan informasi adalah masyarakat yang berpeluang masuk sebagai warga belajar paket kesetaraan paket B yang memang membutuhkan sedangkan informasi eksternal dapat dilakukan dengan tokoh masyarakat yang ada dilapangan dengan memberikan informasi kepada ekstenal (masyarakat luar) misalnya mahasiswa/i yang sedang KKN didaerah tersebut untuk diarahkan kepada program pendidikan kesetaraan yang mungkin bisa dijadikan sasaran pengabdianya dalam melaksanakan program kerjanya. Partisipasi tenaga, ditinjau dari temuan hasil penelitian terkait tentang partisipasi dalam bentuk tenaga diwujudkan warga belajar dengan ikut menyumbangkan tenaganya dengan ikut membersihkan tempat belajar, menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya, membantu sesama warga belajar dan gotong royong.

Hasil dari temuan itu dapat dianalisis bahwa temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan hasil temuan penelitian Hermawan dan Suryono (2016: 4) dimana pada hasil temuannya ditemukan juga partisipasi tenaga diwujudkan dengan semangat gotong royong. Jika dianalisis berdasarkan tingkatan partisipasi partisipasi tenaga yang dilakukan oleh warga belajar masuk dalam tingkatan inisiasi (inisation participation) dimana partisipasi tenaga yang dilakukan oleh warga belajar berdasarkan inisiatif warga belajar sendiri bukan dari pemimpin/tokoh masyarakat baik itu tokoh masyarakat secara formal maupun informal. Tingkatan partisipasi inisiasi merupakan gagasan melakukan sesuatu muncul baik dari diri sendiri maupun kelompok didalam program.

Peran Representasi, sesuai dengan data yang telah didapatkan saat penelitian yang dipaparkan pada hasil temuan data sebelumnya bahwa tidak semua indikator peran tokoh masyarakat dalam melakukan perannya pada peran representasi dilakukan secara efektif. Indikator tokoh masyarakat melakukan peran representasi menurut Ife dalam Huraerah (2011: 73) peran representasi terdiri dari mendapatkan sumber dengan penggunaan media, hubungan masyarakat, jaringan kerja serta berbagi pengetahuan serta berbagai pengetahuan dan pengalaman. Pada saat tokoh masyarakat mendapatkan sumber informasi tentunya membutuhkan penggunaan media yang efektif (Huraerah, 2014: 73). Namun hal itu tidak banyak dimanfaatkan oleh tokoh masyarakat, sesuai dengan hasil yang telah ditemukan peneliti bahwa tokoh masyarakat hanya menggunakan sarana media aplikasi *Whatsapp* saja ketika memberi informasi terkait pendidikan kesetaraan paket B namun tidak untuk mendapatkan sumber informasi terbaru.

Indikator selanjutnya dari peran representasi adalah hubungan masyarakat (warga belajar). Maksud dari hubungan masyarakat (warga belajar) disini adalah hubungan tokoh masyarakat tentang publikasi yang dibutuhkan pada pendidikan kesetaraan sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima (Huraerah, 2014). Namun data/informasi yang didapatkan saat penelitian di lapangan tokoh masyarakat hanya melakukan indikator hubungan masyarakat dengan masyarakat luar saja contoh ketika ada masyarakat yang membutuhkan pendidikan kesetaraan tokoh masyarakat ikut membantu namun hubungan tokoh masyarakat dengan warga belajar yang sedang mengikuti pelaksanaan pendidikan kesetaraan sendiri kurang terjalin secara maksimal. Hubungan mereka hanya terbatas pada kebutuhan saja dan itu dilakukan tokoh masyarakat ketika mengisi keterampilan/*life skill* saja belum ada hubungan tokoh masyarakat dengan warga belajar secara terus menerus/*kontinue* kecuali dengan warga belajar yang memang tinggal di daerah tokoh masyarakat juga tinggal. Implementasi selanjutnya dari tokoh masyarakat dalam melakukan peran tokoh

masyarakat adalah berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Peran representasi diwujudkan interaksi tokoh masyarakat dengan badan eksternal salah satunya adalah pemberian informasi terkait pencarian instruktur keterampilan yang sesuai bidangnya. Peran yang melekat tersebut, membuat warga belajar ikut serta berpartisipasi, yang mana diwujudkan dalam tiga bentuk partisipasi sesuai fokus pada penelitian ini yakni partisipasi dalam bentuk ide/buah pikiran dengan memberikan masukan kepada lembaga, tenaga baik ketika proses pelaksanaan berlangsung maupun diluar proses kegiatan dan harta benda baik berupa saran prasarana yang mendukung proses maupun diwujudkan hanya sekedar makanan yang dibawa untuk dimakan bersama dengan warga belajar yang lain. Hal itu diberikan oleh warga belajar sebagai wujud rasa ikut sertanya dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan paket B. Adanya partisipasi warga belajar ini membantu pelaksanaan kegiatan program pendidikan kesetaraan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Menurut pendapat Tesoiero dalam Hasanah (2017: 3) dan Ife dalam Huraerah (2011: 73) sama-sama mengemukakan bahwa ada empat peran dan keterampilan yang dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam mengembangkan partisipasi warga belajar yakni fasilitatif, pendidikan, representasi dan teknik. Namun pada penelitian ini yang difokuskan pada kajian penelitian ada tiga yakni fasilitatif, pendidikan dan representasi.

Sesuai dengan temuan yang ditemukan dilapangan saat penelitian, peran itu dilakukan oleh tokoh masyarakat dengan saat mengisi keterampilan saja dan pelaksanaannya banyak dilakukan pada satu semester sekali sehingga peran itu dapat disimpulkan masih sedikit, namun meskipun peran yang dilakukan sedikit sebenarnya hal itu bisa membuat warga belajar mampu berpartisipasi hal ini dibuktikan dengan banyaknya warga belajar yang mengikuti keterampilan/*life skill*. Berdasarkan fokus kajian penelitian ini adalah peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi warga belajar sehingga data/informasi yang dianalisis selain peran tokoh masyarakat adalah partisipasi warga belajar.

Partisipasi warga belajar sendiri menurut Nasution dalam Hermawan dan Suryono (2016: 4) menyatakan bahwa bentuk partisipasi dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi dapat berwujud tenaga, uang, barang material ide-ide dan informasi yang berguna bagi penunjang pelaksanaan program. Sedangkan menurut Hamijoyo dan Iskandar dalam Huraerah (2011: 51) mengemukakan beberapa bentuk dari partisipasi yakni partisipasi buah pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan dan kemahiran. Pendapat yang sama juga menyampaikan mengatakan bahwa partisipasi warga belajar dapat berbentuk dengan buah pikiran, tenaga, harta benda dan keterampilan (Suryatna dalam Nurmiayuni, 2011: 1). Untuk memfokuskan penelitian bentuk partisipasi warga belajar yang diambil hanya tiga bentuk yakni ide/buah pikiran, tenaga dan materi yang akan dibahas yakni 1). Partisipasi ide/buah pikiran, berdasarkan hasil temuan dilapangan terkait partisipasi ide/buah pikiran menunjukkan bahwa warga belajar ikut berpartisipasi dalam ide/buah pikiran yang diwujudkan dengan memberi masukan dalam sarana dan prasarana belum sampai pada pemberian kritik dan saran, padahal apabila dianalisis bentuk partisipasi ide/buah pikiran menurut Hamijono dalam Huraerah (2011: 73), menyatakan bahwa wujud/bentuk partisipasi ide/buah pikiran termuat dalam pemberian baik sumbangan pikiran masukan, saran, usulan maupun kritik dalam pelaksanaan kegiatan program pendidikan kesetaraan saat sedang berjalan.

Adanya usulan/ide yang didapat oleh warga belajar sampai terealisasi dapat meningkatkan partisipasi warga belajar dalam mengikuti pelaksanaan pendidikan kesetaraan paket B karena membuat warga belajar merasa nyaman, senang serta merasa terpenuhi apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan warga belajar selama ini. Apabila dianalisis berdasarkan tingkatan partisipasi pada hal ini partisipasi ide/buah pikiran yang dilakukan warga belajar masuk dalam kategori partisipasi inisiasi karena warga belajar berpartisipasi berdasarkan inisiatif warga belajar sendiri belum mengandung inisiatif dari tokoh masyarakat namun ide/buah pikiran yang diberikan masih pada sarana dan prasarana sedangkan untuk

pelaksanaan program mpartisipasi ide/buah pikiran masih sampai usulan penentuan jadwal pelaksanaan belum pada masukkan pendidikan kesetaraan paket B yang lain.

Dengan adanya perbaikan sarana dan prasarana yan telah diusulkan warga belajar dapat membuat warga belajar lebih nyaman, serta efektif misalnya ketika fasilitas tempat ibadah ketika waktunya sholat warga belajar tidak perlu jauh-jauh pergi keluar tempat PKBM karena sudah tersedianya tempat, dan waktu yang digunakan untuk keluar mencari tempat ibadah dapat dibuat istirahat ataupun waktu pelaksanaan pendidikan kesetaraan dapat terlaksana dengan efektif. Namun jika ditinjau dari pelaksanaan progam pendidikan kesetaraan paket B, partisipasi warga belajar masih dalam tahapan partisipasi eksekusi yakni pada tingkat pelaksanaan dimana pada hal ini warga belajar turut serta dengan apapun kegiatan yang selama ini ada pada program pendidikan kesetaraan paket B sendiri.

Partisipasi materi/harta benda. Berdasarkan hasil temuan penelitian partisipasi materi/harta benda yang ditemukan dapat dianalisis bahwa warga belajar pendidikan kesetaraan paket B ikut serta dalam menyumbangkan materi/harta bendanya. Bentuk materi ataupun harta benda yang disumbangkan baik dalam bentuk uang sedangkan benda yang disumbangkan oleh warga belajar selama ini dalam bentuk spidol, buku, cat dan penghapus. Hal itu dilakukan secara suka rela seikhlasnya oleh warga belajar. Temuan tersebut sesuai dengan pendapat oleh Hamijoyo dalam Huraerah, (2011: 173) yang menyatakan partisipasi materi/harta benda yakni partisipasi dalam bentuk iuran baik dalam bentuk uang maupun barang dalam kegiatan, dana dan sarana yang disumbangkan tanpa paksaan. Bila dianalisis berdasarkan tingkatan partisipasi pada hal ini, partisipasi yang dilakukan oleh warga belajar sudah sampai tahap partisipasi inisiasi karena apa yang dilakukan oleh warga belajar muncul karena inisiatif dari diri seseorang warga belajar sendiri tanpa paksaan siapapun dan bukan dari tokoh masyarakat dimana pada hal ini sesuai pendapat Billah dalam Huraerah (2011: 53).

## SIMPULAN

Peran yang dilakukan tokoh masyarakat sesuai dengan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah peran fasilitatif, pendidikan dan representasi. Peran tokoh masyarakat dalam fasilitatif dilakukan tokoh masyarakat dengan memberikan dukungan, tempat, waktu dan menghadiri undangan ketika ada pertemuan. Peran pendidikan diwujudkan dengan meningkatkan kesadaran dan pemberian informasi. Sedangkan peran representasi diwujudkan tokoh masyarakat dengan interaksi tokoh masyarakat dengan badan eksternal salah satunya adalah pemberian informasi terkait pencarian instruktur keterampilan yang sesuai bidangnya. Hasil dari peran itu membuat warga belajar ikut serta berpartisipasi yang mana diwujudkan dalam tiga bentuk partisipasi sesuai yang menjadi fokus pada penelitian ini yakni partisipasi dalam bentuk ide/buah pikiran, tenaga dan harta benda yang diberikan warga belajar sebagai wujud rasa ikut sertanya dalam proses kegiatan pendidikan kesetaraan paket B. Adanya partisipasi belajar ini membantu pelaksanaan kegiatan program pendidikan kesetaraan dapat berjalan dengan efisien dan efektif

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlan, F. & Hati, G. (2017). Upaya Peningkatan Partisipasi dalam Program Masyarakat. Bandung : Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia
- Choesyo. B, A. Soni dan Wibowo. H. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kampung Wisata Kreatif Dago Pojok. *Prosiding KS : Riset dan PKM. Vol (4) : 1*
- Damsar & Indriani. (2016). *Pengantar Sosiologi Pedesaan*. Jakarta : Kencana
- Gedeona. A. B. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi*. 1(3) : 8
- Gunawan, M. B. (2017). Peran Program Keaksaraan Fungsional dalam Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kabupaten Jember. *Skripsi*. Jember: Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Jember
- Hasanah. N. Rahman T. J & Yusuf. A. (2017). Peranan Komunitas Harapan dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Usia Sekolah di Kawasan Pasar Johar Semarang. *Jurnal Of Nonformal and Community Empowerment*. (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc/article/view/16557/10128>) di Akses 29 November 2018
- Huraerah. A. (2011). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora
- Juariah. S. & Widiastuti. N. (2018). Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Mandiri Cipageran Kecamatan Cimahi Utara. *Jurnal Coom-Ed*.1(2)
- Mardikanto, T. Soebianto, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Public*. Bandung : Alfabeta
- Masyhud, S. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jember : Lembaga Pengembangan dan Profesi Pendidikan (LPMPK)
- Nurmiayuni. F. W. (2011). Partisipasi Masyarakat dalam Program Keaksaraan Fungsional Melalui Peningkatan Budaya Tulis Koran Ibu di Rumah Pintar Nuraini Desa Jeruksari Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Yogyakarta : Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta
- Prayitno. D. Pujoyono. W & Warsono. H. (2009). Analisis Rendahnya Partisipasi Masyarakat Pada Implementasi Program Wajib Belajar Sembilan Tahun (Studi Kasus di Distrik Semangga Kabupaten Merauke). UNDIP. *Dialogue Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik JIKP*, Vol.6, No. 1. Januari 2009:13-36
- Rochman. M. T, Marijono & Imsiyah.N. (2017). Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Warga Belajar dalam Program Keaksaraan Fungsional di Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. *Learning Community : Jurnal*



- Pendidikan Luar Sekolah 2017, 1 (1) : 21-24*
- Rohman. A. F. Putra, H. Setiono, L. Riansyah. & A. Saiful. (2012). Partisipasi Warga dalam Pembangunan dan Demokrasi. Program Sekolah Demokrasi : Malang
- Saputra. A. S & Hati. G. (2017). Upaya Peningkatan Partisipasi dalam Program Pengembangan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. 18(1) : 59-78*
- Sudjana. D. (2008). *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suryono. Y. & Hermawan. Y. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Program-Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kepinteran. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat. (1)3: (97:108)*
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.(2012). Sistem Pendidikan Nasional. Jogjakarta : Laksana
- Usman. H & Akbar. P. S. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara
- Zubaedi. (2014). *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Jakarta : Kencana Prendamedia Group